

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PILKADA SERENTAK DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TERNATE SELATAN)**

Mukhti Arif¹, Mulyana²

¹Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak, Maluku Utara, Indonesia

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Indonesia

E-mail: muktiaarif07@gmail.com; mulyana@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini berfokus pada permasalahan masih adanya masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap namun belum menggunakan hak pilihnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, faktor penghambat dan pendukung partisipasi politik masyarakat serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kecamatan Ternate Selatan masih kurang, dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada. Pada penyusunan daftar pemilih partisipasi masyarakat masih kurang karena susah ditemui pada saat pendataan, kemudian pada kegiatan kampanye partisipasi masyarakat juga masih kurang karena banyak yang memilih untuk bekerja dari pada datang mengikuti kampanye begitu juga partisipasi masyarakat dalam pemberian suara yang masih kurang dan tidak mencapai target KPU. Faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada yaitu status sosial dan status ekonomi. Adapun faktor pendukung partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada yaitu afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik melalui kegiatan sosialisasi secara formal dan informal. Adapun saran yang disampaikan, yaitu agar seluruh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak untuk melaksanakan sosialisasi, dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara KPU dengan Pemerintah Daerah agar sosialisasi dilakukan serta pendidikan politik yang berkelanjutan, proses rekrutmen panitia sesuai integritas dan keahlian.

Kata kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Pilkada Serentak.

***VOTERS PARTICIPATION IN REGIONAL ELECTIONS IN TERNATE CITY,
NORTH MALUKU***

ABSTRACT. This research focuses on the problem that there are still people who are registered as permanent voters but have not used their voting rights. The purpose of this study is to determine the level of public political participation in the 2018 Concurrent Regional Head Elections, inhibiting and supporting factors for community political participation and the efforts that have been made to increase public political participation in the 2018 Concurrent Regional Head Elections. This research uses qualitative research methods with descriptive approach. The results of the study show that the Political Participation of the Community in the 2018 Concurrent Regional Head Elections in South Ternate District is still lacking, seen from the number of people who do not exercise their voting rights. This condition is due to the lack of understanding and awareness of the public to participate in the Pilkada. In compiling the voter list, public participation is still lacking because it is difficult to find at the time of data collection, then in campaign activities, community participation is also still lacking because many choose to work instead of coming to the campaign as well as community participation in voting which is still lacking and does not reach the KPU target. The inhibiting factors for community political participation in Pilkada are social status and economic status. The supporting factors for community political participation in the Pilkada are the political affiliation of parents and organizational experience. Efforts have been made to increase political participation through formal and informal socialization activities. The suggestions conveyed, namely that all organizers of the Regional Head Election simultaneously carry out socialization, by increasing communication and coordination between the KPU and the Regional Government so that socialization is carried out as well as sustainable political education, the committee recruitment process is in accordance with integrity and expertise.

Key words: Community Political Participation, Simultaneous Pilkada.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah tahapan penyelenggaraannya telah disusun secara jelas dan sistematis, namun pada kenyataannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Saat ini pilkada mulai melenceng dari moment pesta demokrasi menjadi fenomena politik yang selalu diwarnai dengan persoalan, sehingga membuat masyarakat merasa jenuh dan tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap politik. Adapun masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya Pemilu adalah masih terdapatnya masyarakat yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga pada pelaksanaan Pemilu tidak dapat ikut serta untuk memberikan suaranya. Padahal walaupun tidak terdaftar, masyarakat sebenarnya bisa ikut untuk mencoblos asalkan sudah memiliki e-KTP atau surat keterangan perekaman, namun masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengurusinya. Sosialisasi yang dilakukan baik oleh KPU ataupun pihak Kecamatan sendiri juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, namun pada pelaksanaannya sosialisasi hanya dilakukan di pusat kota saja sehingga masyarakat yang berada di wilayah pinggiran kota kurang

memahami pentingnya ikut berpartisipasi dalam Pemilu.

Adanya Pilkada langsung tidak sepenuhnya menampung dan mewujudkan semua harapan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah. Bukan hanya itu, sebagian besar diantara rakyat di daerah masih kurang paham mengenai pentingnya ikut serta dalam pelaksanaan Pilkada. Rakyat Indonesia saat ini merupakan rakyat yang tergolong dalam budaya politik parokial, yakni budaya politik dengan tingkat partisipasi yang masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah menjadi pengaruh serta pelaksanaan demokrasi yang tidak hanya terjadi sekali ataupun dua kali saja.

Partisipasi masyarakat menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkada hingga saat ini belum banyak terungkap dengan jelas, diibaratkan dengan ruang gelap yang menyisakan banyak pertanyaan. Rakyat yang aktif pada dasarnya adalah rakyat yang tahu mekanisme pendaftaran pemilih tetap. Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan data *real* yang menunjukkan berapa banyak masyarakat yang akan ikut dalam proses pemilihan Kepala Daerah.

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Ternate Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih (jiwa)	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (jiwa)	Jumlah Suara Sah (jiwa)	Jumlah Suara Tidak Sah (jiwa)	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (jiwa)	Presentase (%)
1	Sasa	1.612	1.276	1.257	19	1.276	79.02
2	Gambesi	1.292	1.029	1.024	5	1.029	79.06
3	Fitu	2.342	1.424	1.409	15	1.424	60.08
4	Kalumata	6.165	4.303	4.277	27	3.922	69.08
5	Kayu merah	3.492	2.151	2.130	21	2.151	61.06
6	Bastiong talangame	3.738	1.702	1.697	5	1.702	45.05
7	Ubo-ubo	1.411	1.176	1.101	12	1.113	83.03
8	Mangga dua	1.870	1.287	1.280	7	1.287	68.08
9	Jati	2.857	1.804	2.268	31	2.299	63.01
10	Toboko	1.242	1.018	1.004	14	1.018	82.00
11	Tanah tinggi	2.183	1.571	1.558	16	1.571	72.00
12	Ngade	1.169	854	847	7	854	73.01
13	Bastiong karance	2.860	1.692	1.681	11	1.692	59.02
14	Tabona	2.372	1.767	1.254	17	1.271	74.05
15	Jati perumnas	1.686	1.091	1.079	12	1.091	64.07
16	Mangga dua utara	2.063	1.557	1.534	13	1.547	75.05
17	Tanah tinggi barat	1.483	1.160	1.149	11	1.160	78.02
Jumlah		39.837	26.862	26.549	243	26.407	67.43

Sumber: Kecamatan Ternate Selatan dalam angka, 2018

Tabel 2. Presentase suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ternate Selatan Tahun 2018

No	Kelurahan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sasa	2.145	2.157	4.302
2	Gambesi	720	679	1.399
3	Fitu	1.014	580	1.594
4	Kalumata	3.974	3.867	7.841
5	Kayu merah	3.086	3.334	6.420
6	Bastiong talangame	3.303	4.419	7.722
7	Ubo-ubo	1.182	1.217	2.399
8	Mangga dua	2.149	2.283	4.432
9	Jati	2.695	2.677	5.372
10	Toboko	1.109	1.056	2.165
11	Tanah tinggi	1.773	1.778	3.551
12	Ngade	1.172	1.125	2.297
13	Bastiong karance	2.218	2.222	4.440
14	Tabona	1.951	1.966	3.917
15	Jati perumnas	1.125	1.243	2.368
16	Mangga dua utara	1.602	1.680	3.282
17	Tanah tinggi barat	1.611	1.386	2.997
	Ternate Selatan	32.829	33.669	66.498

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, 2018

Dari hasil rekapitulasi suara yang ditunjukkan oleh tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Ternate Selatan yang paling tinggi terdapat pada Kelurahan Toboko dengan presentase 82.00%. kemudian tingkat partisipasi masyarakat yang sedang berada di beberapa Kelurahan salah satunya di Kelurahan fitu dengan presentase pemilih 60.08% dan kemudian selanjutnya pada tingkat partisipasi masyarakat yang paling rendah terdapat di Kelurahan Bastiong Talangame dengan presentase pemilih sebanyak 45.05%. jumlah ini tentunya masih dinilai kurang dan belum mencapai dari target KPU yakni 75% yang telah ditetapkan pada pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

Penyebab kurangnya jumlah pemilih pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang golput. Golput merupakan istilah untuk kelompok masyarakat yang sadar politik namun tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan. Berbeda dengan kelompok masyarakat yang tidak memilih karena alasan pribadi seperti bekerja ataupun melakukan aktivitas lain daripada ikut berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat di kecamatan Ternate Selatan pada Pilkada serentak tahun 2018 dinilai masih kurang karena masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini disebabkan

kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah dan juga masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik dari pihak KPU sendiri maupun dari aparaturnya di kecamatan Ternate Selatan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Risal dan Pratiwi yang juga memfokuskan pada partisipasi politik masyarakat perbatasan negara pada pilkada serentak di Kabupaten Malinau. Penelitian Risal dan Pratiwi menggunakan *Focus Group Discussion*, wawancara dan pengamatan dalam mengumpulkan data. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pada pilkada serentak Tahun 2015, rendahnya partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh faktor administratif, geografis, kondisi sosial ekonomis dan apatisme masyarakat (Risal & Pratiwi, 2019). Sedangkan penelitian Sa'ban, Sadat dan Nastia pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa pada pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau tergolong tinggi partisipasi masyarakatnya yaitu sebesar 69,87 %. Terdapat 4 (empat) faktor yang memengaruhi partisipasi politik diantaranya faktor karakteristik sosial politik, pribadi dan perangsang politik. (Sa'ban & Sadat, 2019) Pada tahun yang sama, penelitian Parjaman dkk ditemukan bahwa faktor yang memengaruhi partisipasi politik pada Pilkada serentak di Kabupaten Ciamis adalah tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat usia pemilih. (Parjaman & Darna, 2018).

Merujuk pada permasalahan dan penelitian terdahulu, maka peneliti menemukan kebaharuan pada penelitian ini yaitu dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan konsep dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990:9-10) yang mengelompokkan bentuk partisipasi menjadi 4

(empat) yaitu kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, *Contacting*, dan tindakan kekerasan. Pertanyaan penelitian ini adalah: 1) bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak di Kecamatan Ternate Selatan?; 2) faktor apa saja yang menghambat dan mendukung partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak di Kecamatan Ternate Selatan?; dan 3) apa upaya yang dilakukan KPU dan Camat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kecamatan Ternate Selatan?. Adapun tujuan penelitian adalah: 1) untuk mendeskripsikan sejauh mana partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak di Kecamatan Ternate Selatan; 2) untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak di Kecamatan Ternate Selatan dan 3) untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak di Kecamatan Ternate Selatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan wawancara terstruktur (*Structured Interview*) kepada 10 informan yaitu: Camat Ternate Selatan, Ketua KPU Kota Ternate, Komisioner KPU Kota Ternate, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuda, RT/RW, Petani dan Pedagang. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kecamatan Ternate Selatan

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah suatu pemilihan kepala pemerintahan wilayah di tingkat provinsi oleh masyarakat sebagai sarana menyalurkan aspirasi demi perubahan pada suatu daerah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Pemilihan Kepala Daerah, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud dari negara yang demokratis.

Partisipasi politik masyarakat akan berjalan lancar apabila adanya sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari panitia penyelenggara pemilihan kepala daerah serta visi dan misi atau program kerja yang akan diwujudkan oleh para bakal calon kepala daerah. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk menarik perhatian masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah. Karena keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pemilihan kepala daerah yang merupakan wujud suatu sistem demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 di tingkat Kota Ternate memerlukan strategi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kota Ternate. Tercatat sejumlah 20 kali jadwal sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dilaksanakan oleh KPU Kota Ternate yaitu sejak bulan Januari hingga juni 2018. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihannya dipilih secara langsung oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam wawancara dengan Bapak Ismad Sahupala selaku ketua KPU Kota Ternate pada tanggal 14 Januari 2019 mengatakan: “Komisi Pemilihan Umum dalam setiap pelaksanaan Pemilu selalu menggenjot partisipasi dan kualitas pemilih. Kedua hal tersebut harus tercapai karena partisipasi tidak bisa berdiri sendiri, sehingga apabila partisipasi naik sesuai target presentase, maka kualitas hak pilih dalam menggunakan hak pilih juga harus dicapai”. Berdasarkan wawancara diatas yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dalam pemilihan kepala daerah sangat memperhatikan partisipasi dan kualitas hak pilih dari masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan dilapangan Komisi Pemilihan Umum gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Ibu Risawinarti Halil Selaku Komisioner KPU Kota Ternate Dalam wawancara pada tanggal 14 Januari 2019 mengatakan:

“Adanya Pemilihan Kepala Daerah ini menuntut masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalam setiap pelaksanaannya baik dalam kegiatan kampanye, pemilihan, maupun rangkaian kegiatan lainnya. Tugas dari KPU adalah untuk mensosialisasikan tentang Pemilihan Umum ini kepada masyarakat. Akan tetapi tidak semua masyarakat turut serta dalam kegiatan tersebut, karena masih adanya masyarakat yang pada saat pendataan pemilih yang dilakukan di kecamatan Ternate Selatan masih ada warga yang tidak berada dirumahnya, belum lagi ada sebagian pemilih yang sudah di data namun mengatakan belum di data, jadi harus di data ulang kembali , sehingga menyulitkan anggota PPS dan PPDP dalam pemutakhiran data pemilih”.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mengambil peranan penting adalah masyarakat sebagai pengguna hak pilih, salah satu peranan penting masyarakat adalah keikutsertaannya dalam menggunakan hak suara. Karena masyarakat merupakan obyek dari pelaksanaan Pilkada.

Pada penelitian ini penulis akan menguraikan fenomena-fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pilkada berdasarkan hasil

dari wawancara dan dikaitkan dengan teori partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (Huntington, 1990, pp. 9–10) yang telah dilakukan penulis. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, membutuhkan proses pemutakhiran data daftar pemilih, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat terkait dengan Pemilihan. Adapun komponen yang dilibatkan dalam pemutakhiran data pemilih agar mendapat data yang akurat adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah: Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan ditembusan ke Bawaslu. DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin.

DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi, meliputi: Nomor urut; Nomor Induk Kependudukan; Nomor Kartu Keluarga; Nama Lengkap; Tempat Lahir; Umur; Jenis Kelamin; Status Perkawinan Alamat jalan/dukuh. Adapun tabel Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Tahun 2018

No.	Nama Wilayah	Jumlah Jiwa		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pulau Ternate	5,746	5,886	11,632
2	Kota Ternate Selatan	26,565	26,974	53,539
3	Kota Ternate Utara	17,856	18,328	36,184
4	Pulau Moti	1,863	1,869	3,732
5	Pulau Batang Dua	1,047	1,080	2,127
6	Kota Ternate Tengah	20,474	21,005	41,479
7	Pulau Hiri	1,120	1,150	2,270
		74,671	76,292	150,963

Sumber: KPU Kota Ternate Tahun, 2018

Sesuai dengan tabel diatas, KPU Kota Ternate menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kecamatan Ternate Selatan dari Pemerintah Kecamatan Ternate Selatan pada tanggal 7 maret 2018 dalam bentuk *softcopy* yang berjumlah 53.539 jiwa dari jumlah seluruh penduduk Kecamatan

Ternate Selatan sebanyak 66.498. Kemudian dilakukan penyandingan antara DP4 yang diperoleh KPU dan DPT di penyelenggaraan pemilu terakhir masing-masing Kecamatan maka diperoleh data terakhir yaitu Daftar Pemilih Tetap. Adapun tabel Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Kota Ternate

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Ternate Selatan	17	110	17,910	18,743	36,653
2	Ternate Tengah	15	77	15,947	16,664	32,611
3	Ternate Utara	14	80	14,053	14,780	28,833
4	Pulau Batang Dua	6	7	879	916	1,795
5	Pulau Hiri	6	6	980	1,000	1,980
6	Pulau Moti	6	7	1,527	1,586	3,113
7	Pulau Ternate	13	28	5,335	5,337	10,672
TOTAL		77	315	56,631	59,026	115,657

Sumber: KPU Kota Ternate, 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap terbanyak terdapat di Kecamatan Ternate Selatan dengan jumlah DPT sebanyak 36,653 jiwa. Sedangkan Kecamatan Pulau Batang Dua, masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap paling sedikit dengan jumlah DPT 1,795 jiwa. Salah satu wujud partisipasi yang dapat ditunjukkan oleh masyarakat adalah dengan mendukung dan membantu kelancaran petugas dalam proses pendaftaran pemilih. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat berada di rumah ketika petugas melaksanakan pendataan pemilih.

Dalam wawancara dengan Bapak Mochtar Hasyim selaku Camat Ternate Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 mengatakan:

“Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa kekurangan yang terjadi berkaitan dengan partisipasi masyarakat di Kecamatan Ternate Selatan. Seperti masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya. Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah kecamatan telah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun di beberapa lokasi masyarakat lebih memilih untuk bekerja dibandingkan datang ke TPS untuk memilih. Adapun juga masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan pemilihan dikarenakan lokasi pemukiman

masyarakat yang sulit untuk dijangkau. Selain itu, permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Kecamatan belum memiliki KTP, sehingga peluang untuk memberikan hak pilihnya masih sedikit.”

Pada kegiatan penelitian di lapangan maka diperoleh informasi dari narasumber untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilihan kepala daerah dengan berbagai dimensi partisipasi politik menurut teori Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990:9-10) dengan indikator penunjangnya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemilihan

Tahap Penyelenggaraan atau Pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan mulai dari bulan Juni Tahun 2018 sampai dengan pengesahan dan pelantikan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada bulan Desember 2018. Tahap Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. Dalam kegiatan pemilihan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan baik oleh pemilih maupun yang akan dipilih diantaranya pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi pasangan calon, ataupun tindakan lain yang berusaha untuk mempengaruhi hasil pemilu. Adapun wawancara penulis dengan masyarakat yang tinggal di kecamatan Ternate Selatan yaitu

Bapak Abdullah yang berprofesi sebagai pedagang, pada tanggal 17 Januari 2019 terkait partisipasi mereka dalam proses kampanye, mengungkapkan bahwa:

“Pada pelaksanaan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur kemarin saya mengetahuinya, dalam pelaksanaan kampanye tersebut saya sedang menjaga dagangan saya, walaupun saya mendapatkan baju kaos dan uang makan yang dibagi secara gratis dari tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, namun apa boleh buat kalau saya pergi untuk mengikuti kampanye tersebut, lantas siapa yang akan menjaga dagangan saya, walaupun nantinya pasangan tersebut menduduki jabatan sebagai Gubernur namun kadangkala lupa dengan janji-janji yang dulu pernah dia sampaikan” itulah yang membuat kami malas untuk ikut dalam kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.”

Kegiatan pemilihan kepala daerah ini sasaran utamanya adalah partisipasi masyarakat, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kinerja dari pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan hal penting yang harus dilaksanakan.

2. Lobby

Istilah *lobby* menurut Samuel P Huntington dan Joan Nelson (Huntington, 1990, pp. 9–10) yaitu suatu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Adapun *lobby* yang dilakukan disini adalah *lobby politic*, yakni *lobby* yang dilakukan seorang politisi atau pejabat tinggi negara dan pimpinan organisasi dalam komunikasinya dengan masyarakat secara baik dan sopan santun dalam berkata. Inti dari *lobby politic* adalah bagaimana kita dituntut untuk mengerti komunikasi politik.

Adapun hal yang harus di perhatikan ketika *lobby politic* adalah terlebih dahulu mencari

data - data juga mempelajarinya sehingga komunikasi berjalan dengan lancar dan nyaman. Oleh sebab itu, sebelum melakukan *lobby politic* seharusnya siapkan sejumlah tawaran - tawaran pada pihak yang ingin ditemui. Komunikasi politik suatu pembicaraan mengenai kegiatan politik selama komunikasi berjalan dengan baik maka ketika itulah kepentingan politik dari masing – masing pihak yang bersangkutan bisa saling menemukan titik temu yang nantinya digunakan hasil dari *lobby politic* dan menjalin kerjasama yang baik.

3. Kegiatan Organisasi

Suatu kegiatan organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi individu didalam organisasi tersebut, baik selaku anggota organisasi maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan. Kegiatan organisasi harus berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota organisasi. Adapun pengertian organisasi menurut Weber yang dikutip oleh Thoha bahwa: “Organisasi merupakan suatu batasan – batasan tertentu, dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan – aturan tertentu.” (Thoha, 2014, p. 113)

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa suatu kegiatan organisasi harus memiliki regulasi atau aturan yang berlaku sehingga memberi batasan – batasan tertentu dalam berorganisasi. Adapun keterkaitan antara kegiatan organisasi dengan partisipasi politik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi bisa berdampak terhadap partisipasi politik masyarakat dikarenakan sikap masyarakat yang akan mengikuti organisasi tertentu apabila anggapan masyarakat bahwa organisasi tersebut lebih baik.

4. Contacting

Contacting ataupun kontak merupakan suatu hal yang penting karena tanpa adanya kontak dengan orang lain maka suatu persoalan tidak

akan terselesaikan. Merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu kontak atau hubungan sangat berkaitan dengan partisipasi politik, dikarenakan setiap orang akan menghubungi seseorang apabila orang tersebut membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitu juga dengan partisipasi politik, dimana setiap pemimpin harus memiliki hubungan yang baik dengan bawahannya agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai.

5. Tindakan Kekerasan

Menurut Samuel P Huntington dan Joan Nelson (Huntington, 1990, pp. 9–10), maksud dari tindakan kekerasan disini adalah tindakan dari individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru – hara, teror, kudeta, pembutuhan politik, revolusi, pemberontakan dan sebagainya yang berkaitan dengan kerugian fisik. Di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun di daerah selalu ada saja kecurangan maupun hal yang tidak berkenaan dengan aturan baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun para anggotanya. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Provinsi Maluku Utara tak luput dengan berbagai macam kecurangan sehingga didalam pelaksanaannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara harus di bawah ke ranah hukum sehingga harus dilakukan putaran ke dua.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak di Kecamatan Ternate Selatan

Menurut Surbakti (Subakti, 2010, p. 184) bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik)”. Dimana kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan

kewajiban sebagai warga negara menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat hidupnya. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah. Menurut Surbakti (Subakti, 2010, p. 185) bahwa tinggi rendahnya kedua faktor tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu:

1. Status sosial, merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan;
2. Status ekonomi, merupakan kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan;
3. Afliasi politik orang tua; dan
4. Pengalaman berorganisasi

Didalam setiap proses pelaksanaan Pemilihan Umum dari tahun ke tahun selalu ada hambatan –hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan KPU selaku pihak penyelenggara umum. Hambatan-hambatan tersebut bisa berupa kendala teknis pemilu maupun hambatan yang terjadi selama proses berlangsungnya penyelenggaraan pemilu. Yang berakibat pada berkurangnya partisipasi politik masyarakat. Berikut ada beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kecamatan Ternate Selatan:

1. Status Ekonomi

Menurut Surbakti (Subakti, 2010, p. 185) bahwa yang dimaksud dengan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan, atau dengan kata status sosial adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Ternate Selatan sebagian besar merupakan ekonomi menengah

kebawah, dimana sebagian besar masyarakat hanya berprofesi sebagai petani, nelayan dan pedagang sehingga masyarakat di Kecamatan Ternate Selatan lebih mengutamakan mencari kebutuhan hidupnya dibandingkan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Komisioner KPU Kota Ternate Ibu Risawinarti Halil pada tanggal 14 Januari 2019 mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat Kecamatan Ternate Selatan yang tingkat ekonominya masih kurang atau menengah kebawah ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi mereka untuk terlibat langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kecamatan Ternate Selatan, dimana masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, nelayan dan pedagang ini dengan pendapatan yang tidak terlalu besar, membuat mereka lebih mementingkan untuk bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya daripada untuk terlibat dalam proses Pemilihan tersebut”.

Selain wawancara dengan Komisioner KPU, adanya wawancara yang dilakukan dengan Rahmat remaja di Kecamatan Ternate Selatan pada tanggal 17 Januari 2019, mengungkapkan bahwa:

“dengan harga barang pokok yang semakin hari semakin naik dan mahal, membuat kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melihat kondisi seperti ini saya lebih memilih untuk membantu orang tua saya berjualan atau berdagang dan bekerja dari pada saya harus capek-capek untuk pergi mencoblos, lebih baik saya mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau saya tidak bekerja membantu orang tua siapa yang memberi saya uang untuk jajan atau membeli barang yang saya inginkan.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diperoleh informasi bahwa masyarakat di Kecamatan Ternate Selatan memiliki status ekonomi yang masih rendah atau menengah kebawah, dengan status tersebut mempengaruhi pola mindset mereka untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana berujung pada berkurangnya partisipasi politik dalam Pemilihan. Belum lagi harga barang

pokok yang kian hari makin naik dan mahal mau tidak mau membuat pemilih pemula pun untuk terpengaruh mengikuti orang tuanya berdagang dan bertani untuk melangsungkan kehidupan keluarganya dibanding untuk datang ke tempat Pemilihan guna melakukan pencoblosan.

2. Status Sosial

Menurut Surbakti (Subakti, 2010, p. 185) bahwa status sosial adalah kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Atau dengan kata lain status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian. Faktor status sosial dalam pemilihan kepala daerah serentak ini dapat dilihat dari bagaimana pekerjaan dan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Kecamatan Ternate Selatan yang masih kurang, keadaan ini yang berakibat pada terbangunnya persepsi masyarakat yang tidak tepat berkaitan dengan hak politik masyarakat sebagai pemilih.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Camat Ternate Selatan Bapak Mochtar Hasyim di Kantor Kecamatan Ternate Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 mengungkapkan bahwa:

“dengan kedudukan masyarakat Kecamatan Ternate selatan khususnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, buruh dan juga pedagang ditambah tidak didukung dengan pendidikan yang baik tersebut membuat warga masyarakat kecamatan Ternate Selatan khususnya yang berada di Kelurahan Sasa, Gambesi, Fitu, dan Ngade yang merupakan daerah pinggiran kota yang berada di belakang gunung gamalama membuat partisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masih kurang, karena dari segi pendidikan dan pola pikir masyarakat yang rendah maka pemahaman terkait pentingnya Pemilu pun menjadi berkurang”.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Ternate Selatan, hal ini disebabkan karena semakin tingginya tingkat pendidikan, maka pengetahuan politik juga akan semakin tinggi, sehingga masyarakat yang berpendidikan tinggi akan menyadari pentingnya ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Namun sebaliknya apabila tingkat pendidikan masyarakat yang kurang maka pemahaman masyarakat terkait pemilihan kepala daerah ini pun jauh dari apa yang diharapkan, sehingga secara otomatis partisipasi masyarakat akan menjadi berkurang.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa status sosial seseorang dapat memberikan peranan penting pada keikutsertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Ketika masyarakat tersebut memilih ikut berpartisipasi dalam politik maka status sosial itu akan semakin tinggi. Dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Ternate Selatan dapat dilihat bahwa pekerjaan dan pendidikan yang kurang membuat partisipasi politik menjadi rendah, dimana pada kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk bekerja dan hanya mengharapkan imbalan dari tim sukses pasangan calon, sehingga akan berdampak pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah.

C. Faktor Pendukung Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara

1. Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi politik orang tua menjadi faktor pertimbangan dalam partisipasi politik, dimana terdapat kesejajaran hubungan antara pekerjaan orang tua dengan pilihan anak. Menurut Soekanto menjelaskan bahwa bimbingan dari para orang tua dibutuhkan oleh para remaja dalam rangka meraih impiannya. (Soekanto, 2004, p. 52). Sehingga dengan sendirinya anak tersebut akan mengikuti tindakan dari orang tuanya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Camat Ternate Selatan Bapak

Mochtar Hasyim pada tanggal 14 Januari 2019 mengungkapkan bahwa:

“lingkungan tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap proses pemilu baik dari keluarga maupun dari teman. Apalagi memilih pemula dimana ia perlu bimbingan dari orang tuanya. Sebesar apapun pengaruh dari orang tua tetapi faktor pergaulan dan media sosial lebih besar pengaruhnya bagi memilih pemula tersebut. Disini peran orang tua sangat diperlukan untuk memilih pemula agar timbul rasa kesadaran dalam dirinya untuk datang melakukan pencoblosan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, partisipasi politik pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 salah satunya didorong oleh faktor afiliasi politik orang tua, karena orang tua menjadi faktor penentu bagi memilih pemula untuk datang maupun dalam menentukan pilihannya dalam pelaksanaan pemilu.

2. Pengalaman Berorganisasi

Pengalaman berorganisasi merupakan salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, hal ini berkaitan dengan kehidupan seseorang yang pernah terlibat dalam setiap kegiatan organisasi sosial maupun politik, sehingga orang tersebut memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang tidak pernah merasakan berorganisasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Camat Ternate Selatan Bapak Mochtar Hasyim pada tanggal 14 Januari 2019 beliau mengungkapkan bahwa:

“Berdasarkan pemantauan dilakukan bahwa masyarakat yang hadir dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 secara umum adalah masyarakat yang sudah memiliki kesadaran dan rasa penasaran terhadap pemilu, adapun memilih pemula walaupun mereka belum paham tentang pemilu namun adanya keterlibatan orang tua untuk mengajak anak tersebut dengan sendirinya anak tersebut akan paham. Ditambah lagi hadirnya masyarakat yang sudah terbiasa dalam berorganisasi yang memiliki sifat kepedulian pada pemilu dan

terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu tersebut.”

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat dilihat bahwa pengalaman seseorang dalam berorganisasi menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara ini. Sehingga dengan pengalaman yang dimiliki dalam berorganisasi tersebut membuat seseorang sadar akan pentingnya sebuah partisipasi dalam pemilu.

D. Upaya yang dilakukan KPU dan Camat untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kecamatan Ternate Selatan

Partisipasi politik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat penyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini tentu perlu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi, yaitu dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Partai Politik sebagai peserta pemilu, dan pemerintah sebagai fasilitator. Adapun Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Ternate Selatan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Bapak Ismad Sahupala di Kantor KPU Kota Ternate pada tanggal 14 Januari 2019 beliau mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah: KPU berusaha memperbaiki sumber daya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas dari penyelenggara pemilu baik dari tingkat PPK, PPS dan KPPS. Hal ini dilakukan untuk memperkuat atau memperkuat badan atau lembaga guna menghasilkan kinerja yang baik.

Pada proses Sosialisasi, KPU berusaha meningkatkan partisipasi dengan memberikan pendidikan politik bagi pemilih melalui tatacara dalam pelaksanaan pemilu serta memberikan pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang ini merupakan sebuah upaya dalam melakukan

perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai. Memperbaiki sistem penghitungan suara dengan cara survei atau jajak pendapat dan penghitungan suara yang cepat, dalam hal ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kecamatan Ternate Selatan tergolong masih kurang dan tidak mencapai target yang diinginkan oleh KPU yaitu 75.5%. Hal ini dapat dilihat dari 53.539 jiwa yang terdaftar sebagai pemilih hanya 36.653 yang menggunakan hak pilih atau hanya mencapai 67.43%. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa Pemilihan yang terjadi di Kecamatan Ternate Selatan baik dari tahapan hingga proses penyelenggaraan belum berjalan dengan apa yang diharapkan. Terutama dapat dilihat di Kelurahan Bastiong Talangame yang tingkat partisipasi masyarakat hanya 45.05%. Tingkat partisipasi ini tergolong masih kurang, padahal suara tersebut sangat diperlukan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini, mengingat pasangan calon yang nantinya terpilih menjadi pemimpin baru di masyarakat dan akan menjadi ujung tombak dalam Pemerintahan Provinsi Maluku Utara untuk 5 (lima) tahun kedepannya.
2. Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Maluku Utara diantaranya ada faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pemilu.

a. Faktor penghambat:

1) Status Ekonomi

Kondisi ekonomi tentu saja mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Ternate Selatan dalam pelaksanaan pemilu, bagi masyarakat yang kondisi ekonomi menengah kebawah, sebagaimana yang telah diuraikan dihasil Penelitian pada rekapitulasi pemilih tetap. Masyarakat banyak yang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja dari pada datang ke TPS untuk melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

2) Status Sosial

Pendidikan dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat Kecamatan Ternate Selatan, yakni dengan latar belakang pendidikan yang dapat dikatakan masih rendah, keadaan ini berakibat pada terbentuknya persepsi masyarakat yang tidak baik terhadap politik. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai masih ada masyarakat yang menginginkan imbalan financial yang mereka terima pada saat proses Pemungutan Suara.

b. Faktor Pendukung

1) Afliasi Politik Orang Tua

Afliasi politik dari orang tua tentu sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat di Kecamatan Ternate Selatan. Dapat dilihat dari partisipasi ini bagaimana apa yang menjadi pilihan orang tua tentunya menjadi pilihan anaknya juga, belum lagi orang tuanya yang terlibat sebagai tim sukses dari pasangan calon pasti orang tua tersebut bisa untuk

mempengaruhi anaknya bahkan keluarganya.

2) Pengalaman berorganisasi

Pengalaman seseorang yang sudah pernah berorganisasi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kecamatan Ternate Selatan dalam Pemilu, sehingga dari pengalaman seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang pentingnya sebuah partisipasi dalam sebuah kegiatan tentu saja akan menambah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

3. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Kecamatan Ternate Selatan adalah memperbaiki sumberdaya dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas dari penyelenggara pemilu, kemudian meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat serta sosialisasi yang baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan Pemerintah sebagai fasilitator dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Huntington, S. P. dan J. N. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Parjaman, T., & Darna, N. (2018). *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018*.
<http://repository.uniga1.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/225/25.pdf?sequence=1>
- Risal, S., & Pratiwi, E. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan Negara dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Malinau. *Dia: Jurnal Administrasi Publik*, 22, 11–32.
<https://core.ac.uk/download/pdf/296267830.pdf>

- Sa'ban, L. . A., & Sadat, A. dan N. (2019).
Jurnal ilmu pemerintahan: Kajian Ilmu pemerintahan dan Politik Daerah.
4(April), 29–38.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Rineka Cipta.
- Subakti, R. (2010). *memahami ilmu Politik*. PT Grasindo.
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya, cetakan ke-23*. Rajawali Pers.